

Disbudpar PPU Gencar Cari Dana APBN untuk Pengembangan Wisata Mangrove



Sumber Gambar: KORANKALTIM Selasa, 06/01/2026

KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara (Disbudpar PPU) terus menggencarkan upaya pencarian pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar PPU, H. Rusli, menjelaskan, mereka bersama Bupati PPU, Mudyat Noor, aktif melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memperoleh dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kegiatan yang sedang kami gencarkan sekarang adalah menjalin komunikasi langsung dengan Kementerian Pariwisata dan kementerian terkait lainnya. Kami bersama Bupati PPU mencari pendanaan di luar APBD melalui APBN, dengan SKPD pengampunya adalah Disbudpar,” kata Rusli, Selasa (6/1/2026).

Dialog dengan kementerian memberikan harapan baru bagi pengembangan pariwisata, khususnya bagi pelaku seni dan budaya di PPU. “Kami sudah berdialog dengan kementerian, *Alhamdulillah* banyak terobosan-terobosan. Mudah-mudahan bisa langsung direspons oleh menteri. Beliau menjanjikan sesuatu yang membuat angin segar bagi kami, terutama pelaku-pelaku seni,” sebut Rusli lagi. Satu dari rencana besar yang diusulkan adalah pengembangan jembatan mangrove yang saat ini telah direnovasi. Jembatan tersebut direncanakan akan diperpanjang sekitar 70 meter ke arah laut dan dibentuk menyerupai huruf T di kawasan pesisir. “Jembatan mangrove yang sudah kita renovasi ingin kita panjangkan lagi ke laut kurang lebih 70 meter, membentuk T di pesisir sehingga berhadapan langsung dengan laut. Di ujungnya akan dibangun jembatan lagi yang

menyambung dengan jembatan yang sudah ada, sehingga *view*-nya langsung ke laut,” jelasnya.

Selain itu, Disbudpar PPU juga merencanakan pengembangan fasilitas kuliner di sisi kiri dan kanan jembatan sebagai penunjang kenyamanan wisatawan. Namun diakui Rusli masih ada kendala yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan jaringan telekomunikasi di kawasan tersebut. “Permasalahan kami sekarang di sana masih *blank spot*, jaringan juga sangat terbatas. Kami masih berkoordinasi dengan Telkom dan Indosat,” ucap Rusli lagi. Opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan *Starlink*, namun biaya pemasangan dan operasional masih menjadi bahan kajian.

“Rencana saya *Starlink*, tapi biayanya cukup besar karena mereka juga harus menghitung keuntungan. Mendirikan menara itu biayanya tidak kecil, lalu konsumennya siapa. Satu-satunya mungkin *Starlink*, tapi pembiayaannya masih dikaji,” tutupnya.

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Disbudpar PPU Gencar Cari Dana APBN untuk Pengembangan Wisata Mangrove, 06/01/2026

Catatan:

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 18 Tahun 2025 (UU 10/2009) menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - b. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman;
 - c. mengembangkan warisan budaya dan mengangkat kearifan lokal;
 - d. membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
 - e. menjadikan pariwisata lebih berkualitas dengan mengembangkan inovasi dan menggunakan transformasi digital di bidang pariwisata;
 - f. meningkatkan daya saing pariwisata;
 - g. menciptakan lapangan pekerjaan;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air dengan meningkatkan citra bangsa;

2. Pasal 6 UU 10/2009 menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan melalui kegiatan wisata.
3. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2009 pariwisata berkualitas memenuhi kriteria:
 - a. prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. kualitas hidup masyarakat lokal;
 - c. indeks kepuasan wisatawan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. penguatan nasionalisme; dan
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan.